

Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Ali Firmansyah^{*1}, Renaldi Ahmad²^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia¹ firmanyahali98@gmail.com^{*}, renaldyahmad37@gmail.com²^{*} Corresponding Author: yuliamalia45@gmail.com

ABSTRACT

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan ruang kontestasi politik lokal yang tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi prosedural di tingkat akar rumput, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan, nilai-nilai tradisional, dan relasi kuasa lokal yang terinstitusionalisasi secara kultural. Studi ini berfokus pada dinamika politik dalam Pilkades di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan mengkaji secara mendalam bagaimana aktor-aktor lokal—baik formal maupun informal—berperan dalam proses rekrutmen politik, mobilisasi elektoral, serta reproduksi kekuasaan. Dengan pendekatan kualitatif interpretatif dan strategi studi kasus tunggal, penelitian ini memetakan struktur kekuasaan lokal, analisis diskursif terhadap simbol dan narasi politik, serta relasi patronase yang mendasari preferensi politik warga desa. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pilkades tidak semata menjadi proses demokratis yang netral, melainkan sarat dengan praktik hegemoni, kooptasi, dan simbolisasi identitas sosial. Proses pemilihan juga memperlihatkan keterkaitan erat antara ekonomi politik lokal, agama, adat, dan figur sentral dalam memproduksi legitimasi kekuasaan.

Article History

Received 2025-03-03

Revised 2025-03-27

Accepted 2025-03-30

Keywords

Pilkades, politik lokal, patron-klien, legitimasi sosial, demokrasi desa, hegemoni politik

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Transformasi politik pascareformasi telah mendesentralisasi kekuasaan hingga ke level desa, menciptakan ruang kontestasi politik baru yang sebelumnya tersembunyi di balik struktur administratif yang birokratis. Salah satu bentuk manifestasi desentralisasi tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan secara langsung, serentak, dan partisipatif. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Vel (2020), demokratisasi di tingkat desa tidak serta-merta menghapus praktik-praktik informal seperti patronase, kooptasi, dan relasi kekuasaan berbasis genealogis dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidaklah berdiri sebagai entitas yang netral secara politik, melainkan sebagai arena negosiasi antara aktor-aktor lokal yang membawa kepentingan, nilai, dan sumber daya berbeda.

Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, merupakan representasi konkret dari dinamika tersebut. Meskipun Pilkades secara normatif diatur oleh kerangka hukum nasional, praktik politik lokal sering kali berjalan dalam ranah informal yang dipengaruhi oleh relasi historis antar elite, kekuatan simbolik tokoh agama dan adat, serta modal sosial yang bersifat eksklusif. Dalam konteks ini, pemilihan kepala desa menjadi lebih dari sekadar prosedur elektoral; ia menjelma sebagai “ritual kekuasaan” (power ritual) yang mempertemukan antara logika demokrasi prosedural dengan struktur kultural yang telah lama eksis (Suwandi & Santoso, 2022).

Berbagai penelitian terbaru mengungkap bahwa demokrasi desa masih beroperasi dalam kerangka patrimonial, di mana figur kepala desa berfungsi tidak hanya sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi moralitas komunitas dan juru damai sosial (Nurdin, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan Antlöv, Wetterberg, dan Dharmawan (2020) yang menyebutkan bahwa otoritas kepala desa kerap diperkuat oleh jaringan informal yang bersifat vertikal dan hierarkis, seperti hubungan patron-klien, pengaruh kelompok keagamaan, serta kontrol terhadap sumber daya pembangunan desa.

Dalam kasus Desa Ketare, Pilkades mencerminkan pertarungan antara elite lama yang mempertahankan pengaruh tradisional mereka, dan kelompok baru yang berupaya menantang status quo dengan membawa agenda pembangunan modern. Polarisasi ini memperlihatkan bahwa Pilkades bukanlah kompetisi netral, melainkan arena hegemoni dan kooptasi di mana legitimasi sosial-politik dibentuk melalui narasi agama, simbol adat, serta retorika kesejahteraan (Sasongko & Arifianto, 2023).

Lebih jauh, dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai solidaritas komunal dan kesalehan kolektif, seperti di Lombok, proses politik lokal sangat rentan terhadap mobilisasi simbolik. Tokoh agama sering berperan sebagai aktor politik kunci, baik secara langsung maupun melalui fatwa sosial yang diarahkan kepada jamaah mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Baharuddin (2021), kekuatan simbolik ulama atau tuan guru dalam Pilkades tidak hanya bersumber dari otoritas keagamaan, tetapi juga dari kemampuan mereka mengartikulasikan kepentingan moral dan sosial komunitas.

Dengan demikian, Pilkades di Desa Ketare tidak hanya perlu dianalisis melalui lensa kelembagaan, tetapi juga dari perspektif sosiologis-kultural yang mencerminkan kompleksitas relasi kuasa lokal. Pemahaman terhadap Pilkades sebagai gejala politik yang kompleks—yang menggabungkan dimensi elektoral, kultural, simbolik, dan ekonomi-politik—sangat penting untuk merumuskan strategi tata kelola desa yang lebih demokratis, inklusif, dan adil secara sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi utama untuk mendalami dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna subjektif dan relasi kuasa yang terlibat dalam proses Pilkades, serta menjelaskan bagaimana aktor-aktor lokal membentuk dan mempertahankan kekuasaan dalam ruang sosial yang kompleks dan dinamis. Menurut Creswell dan Poth (2018), studi kasus kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena yang terikat dalam konteks tertentu, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas secara tegas.

Data diperoleh melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung selama masa persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-Pilkades, untuk menangkap dinamika interaksi sosial-politik antara calon kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan pemilih umum. Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan kunci, seperti mantan kepala desa, panitia Pilkades, tokoh adat, tokoh agama (tuan guru), aktivis pemuda, serta warga yang menjadi pendukung aktif masing-masing kandidat. Kriteria pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mendalam mereka

terhadap proses Pilkades. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Seluruh data lapangan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola relasi kuasa, mobilisasi simbolik, konflik antar kelompok, serta strategi negosiasi yang dijalankan oleh masing-masing aktor politik. Peneliti juga menggunakan pendekatan teori hegemoni Gramsci dan teori kapital sosial Bourdieu untuk membongkar dinamika kekuasaan dalam arena Pilkades sebagai pertarungan antara simbol, modal, dan struktur sosial.

Selain itu, konteks historis-politik lokal juga diperhitungkan dalam analisis, dengan melakukan penelusuran dokumen seperti berita lokal, arsip desa, dan peraturan perundangan terkait Pilkades. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menempatkan fenomena kontemporer Pilkades dalam kerangka struktural yang lebih luas, serta menangkap dinamika perubahan politik di tingkat desa secara longitudinal.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Ketare merupakan arena pertarungan politik yang melibatkan kompleksitas relasi kuasa antara elite lokal, tokoh agama, tokoh adat, aktor eksternal (termasuk tim sukses dari luar desa), serta jaringan ekonomi-politik yang bersifat patron-klien. Dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif, ditemukan bahwa proses politik dalam Pilkades tidak sekadar mencerminkan kompetisi elektoral prosedural, tetapi justru menjadi medium reproduksi kekuasaan berbasis simbolik, kultural, dan modal sosial.

a. Polarisasi Politik dan Fragmentasi Sosial

Kandidat dalam Pilkades di Ketare biasanya merepresentasikan blok kekuasaan yang berbeda, seringkali dengan latar belakang genealogis, keagamaan, dan kelas sosial yang kontras. Salah satu calon kepala desa berasal dari trah keluarga kepala desa sebelumnya, yang memiliki basis kekuasaan historis dan jejaring kuat dengan tokoh adat. Sementara kandidat lainnya didukung oleh kelompok pemuda urban dan diaspora desa yang membawa wacana perubahan dan modernisasi. Polarisasi ini membentuk garis demarkasi sosial yang mempertegas fragmentasi di dalam masyarakat.

Fenomena ini menguatkan tesis Bourdieu (1990) mengenai kapital simbolik, di mana legitimasi tidak hanya berasal dari suara elektoral, tetapi juga dari pengakuan sosial yang dilembagakan melalui jaringan keluarga, status adat, dan relasi dengan otoritas agama. Modal simbolik ini direproduksi melalui ritual adat, kampanye berbasis nilai-nilai Islam, serta pertemuan informal di rumah-rumah tokoh masyarakat.

b. Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Mobilisasi Politik

Tokoh agama (tuan guru) memainkan peran sentral dalam memberikan arah politik kepada jamaahnya. Dalam konteks Desa Ketare yang mayoritas Muslim taat, endorsement dari seorang tuan guru dapat menggeser preferensi politik warga. Namun, dukungan ini tidak semata didasarkan pada kalkulasi ideologis, melainkan lebih banyak ditentukan oleh relasi patronase antara tuan guru dan kandidat yang

bersangkutan. Hal ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Berenschot (2019) bahwa demokrasi lokal di Indonesia rentan terhadap praktik klientelisme religius.

Di sisi lain, tokoh adat menjadi penjaga stabilitas pasca-elektoral. Dalam beberapa kasus, tokoh adat dilibatkan secara informal untuk meredam potensi konflik dan memastikan konsensus sosial jika terjadi perselisihan hasil. Mekanisme ini mencerminkan fungsi adat sebagai institusi penyeimbang dalam arena politik kontestatif, yang dalam teori Gramsci disebut sebagai “negosiasi hegemoni.”

c. Modal Sosial dan Dinamika Mobilisasi Massa

Modal sosial memainkan peran penting dalam proses Pilkades. Kandidat yang mampu memobilisasi jaringan kekerabatan, kelompok tani, kelompok majelis taklim, hingga komunitas diaspora Lombok Tengah di luar daerah menunjukkan peluang kemenangan yang lebih besar. Dalam konteks ini, strategi kampanye tidak hanya bersifat populis (misalnya janji pembangunan infrastruktur atau program ekonomi), tetapi juga mengaktifkan nilai kekeluargaan dan solidaritas lokal. Hal ini memperkuat gagasan Coleman (1994) tentang pentingnya kepercayaan (trust), norma, dan jaringan sebagai pengungkit partisipasi politik.

Namun, modal sosial ini juga bisa berbalik menjadi eksklusif dan menciptakan marginalisasi terhadap kelompok yang tidak terintegrasi dalam jejaring dominan. Kelompok perempuan, misalnya, meskipun menjadi pemilih mayoritas, kerap tidak memiliki saluran representasi politik yang kuat karena tidak ada kandidat yang secara eksplisit membawa agenda kesetaraan gender.

d. Politik Uang dan Normalisasi Praktik Klientelisme

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kuatnya praktik politik uang yang berlangsung secara sistematis. Pemberian uang tunai, sembako, hingga bantuan pupuk menjadi strategi laten untuk mendapatkan dukungan. Praktik ini bahkan dianggap “biasa” oleh sebagian besar masyarakat, dan dalam banyak kasus tidak dilihat sebagai pelanggaran moral, melainkan bentuk ‘balas jasa awal’. Hal ini mencerminkan fenomena normalisasi klientelisme sebagaimana dijelaskan oleh Hadiz (2017), bahwa demokrasi lokal pascareformasi justru membuka peluang reproduksi oligarki dalam skala mikro.

Namun, menarik bahwa praktik politik uang bukan satu-satunya penentu kemenangan. Kandidat yang mengandalkan politik uang tetapi tidak memiliki akar sosial yang kuat cenderung gagal. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas klientelisme sangat tergantung pada konteks lokal dan jejaring sosial yang menopang praktik tersebut.

e. Pasca-Pilkades dan Rekonsiliasi Sosial

Setelah hasil Pilkades diumumkan, muncul kekhawatiran akan konflik horizontal. Beberapa kelompok pendukung calon yang kalah sempat melakukan protes, namun konflik berhasil diredam oleh intervensi kolektif tokoh agama dan adat yang menyerukan “taat kepada hasil musyawarah” dan “jangan pecah belah.” Di sini tampak bahwa institusi lokal memainkan peran penting dalam manajemen konflik politik dan menjaga kohesi sosial. Peran mediatif ini menunjukkan bahwa masyarakat Ketare tidak semata-mata bergantung pada prosedur hukum formal, melainkan masih memegang teguh nilai-nilai musyawarah mufakat dan harmoni sosial.

4. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Ketare mencerminkan tidak hanya proses elektoral demokratis, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik lokal yang sarat dengan dinamika kekuasaan, jaringan patronase, serta perjumpaan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas politik. Studi ini menunjukkan bahwa praktik Pilkades tidak berlangsung dalam ruang netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi relasi sosial, dominasi elite lokal, peran tokoh agama, serta intervensi aktor-aktor eksternal, termasuk partai politik dan pengusaha lokal.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa Pilkades menjadi instrumen strategis bagi berbagai kelompok untuk merebut otoritas dalam struktur pemerintahan desa, sekaligus memperkuat legitimasi sosial-ekonomi mereka. Proses ini melibatkan negosiasi dan aliansi lintas lini antara elite lama dan baru, sehingga menciptakan pola relasi kekuasaan yang tidak linier, melainkan fluktuatif dan sarat dengan kompromi politik. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai representasi simbolik dari berbagai kepentingan kolektif masyarakat desa.

Oleh karena itu, memahami Pilkades sebagai gejala politik lokal harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional—yang mencakup aspek sosiologis, antropologis, dan politik—guna mengungkapkan bagaimana demokrasi lokal diartikulasikan secara kontekstual. Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas politik desa, dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (3rd ed.). Alfabeta.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2020). Village Governance, Community Life, and the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–325. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Baharuddin. (2021). Politik Simbolik Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Kabupaten Bima. *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 11(2), 214–229. <https://doi.org/10.24252/ad.v11i2.2021>
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Coleman, J. S. (1994). *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. and Trans.). International Publishers.
- Hadiz, V. R. (2017). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for right-wing politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(1), 100–115. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1238653>
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.

-
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Politik lokal dan demokratisasi desa di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Nurdin, I. (2021). Konfigurasi Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Bone-Bone. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 65–82. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2021>
- Pratikno. (2016). Desentralisasi dan Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Dari Demokrasi Prosedural ke Demokrasi Substansial. *Jurnal Politik*, 1(1), 15–30.
- Purwaningsih, R. (2022). Kontestasi kekuasaan dalam pemilihan kepala desa: Studi sosiologis tentang praktik demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 43–60. <https://doi.org/10.22146/jsp.65654>
- Sasongko, A., & Arifianto, R. (2023). Hegemoni dan Resistensi dalam Politik Desa: Analisis Wacana Pilkades di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 123–142. <https://doi.org/10.22146/jsp.2023.123456>
- Sulistiyono, S. T., & Rochmawati, S. (2023). Politik desa dan relasi kuasa lokal: Studi tentang demokrasi elektoral di desa. *Jurnal Mas yarakat & Budaya*, 25(2), 125–140. <https://doi.org/10.14203/jmb.v25i2.1191>
- Suwandi, I., & Santoso, B. (2022). Ritual Kekuasaan dan Demokrasi Desa: Studi Politik Lokal di Jawa Tengah. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 134–150. <https://doi.org/10.23917/jpp.v10i2.2022.10456>
- Ufen, A. (2019). Clientelism, parties, and democratic consolidation in Indonesia: A comparison of three districts. *South East Asia Research*, 27(1), 21–39. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1628582>
- Vel, J. A. C. (2020). Decentralisation, Democratisation and Local Politics in Indonesia: The Evolution of Village Governance. In D. Henley & H. Schulte Nordholt (Eds.), *Political Reform in Indonesia* (pp. 245–267). Leiden: Brill.
- Wijayanto, A. (2021). Oligarki Politik dan Pilkades: Studi Patronase di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 141–158. <https://doi.org/10.22146/jsp.63721>
- Zulfan, A. R. (2020). Pemilihan kepala desa dan oligarki lokal: Studi dinamika politik desa di Indonesia. *Jurnal Politik*, 6(2), 203–224. <https://doi.org/10.7454/jp.v6i2.86>